

ALASAN AMERIKA SERIKAT TETAP MEMBERLAKUKAN EMBARGO EKONOMI TERHADAP KUBA PASCA NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK

Ibnu Haridzah¹

***Abstract:** This research aims to describe the reason United States continuing to impose an economic embargo on Cuba after normalization of diplomatic relations. This research adopt Foreign Policy concept. Furthermore, the research is classified as explanatory research and the data resources identified as secondary that obtained from literature study. The results shows that, United States still maintain economic embargo on Cuba after normalization of diplomatic relations due to factors. First factor is external source which include systematic sources relating Cuba has not met the requirements of the US LIBERTAD Act Such as the issues of human right, democracy and claim of American private asset in Cuba. Second factor is US internal source which include government sources, relating to conditions in the US government where Republican parties won in congress and rejection by Elites in Senate Council.*

***Keywords:** Diplomatic Relation Normalization, Economic Embargo, Foreign Politics, US Foreign Policy*

Pendahuluan

Amerika Serikat dan Kuba merupakan dua negara yang berdekatan secara geografi. Kedekatan tersebut juga berimplikasi terhadap adanya komunitas Kuba terbanyak serta komunitas latin lainnya di wilayah AS. Hal itu bisa dilihat dari sejarah panjang hubungan kedua negara semenjak era kolonial Spanyol di Karibia pada 1895 ketika AS membantu Kuba dalam memperjuangkan kemerdekaan dan perang melawan Spanyol. Setelah kekalahan Spanyol, AS mendominasi wilayah Kuba dan membantu Kuba menjadi negara republik yang dipimpin oleh Tomas Estrada pada tahun 1902 (bbc.com, 2018).

Hubungan baik antara AS-Kuba terus berlanjut hingga di era Presiden Batista tahun 1934 -1958. Namun hubungan baik AS-Kuba berubah menjadi konflik ketika terjadi revolusi di Kuba pada tahun 1958 yang dipimpin oleh Fidel Castro. Revolusi tersebut berhasil menggulingkan Rezim Batista sehingga kemudian pemerintahan Kuba diambil alih oleh Fidel Castro pada tahun 1959. Pada saat itu terdapat perbedaan pandangan dalam pemerintahan AS menanggapi naiknya rezim Fidel Castro. Dimana presiden AS saat itu Eisenhower tidak suka Fidel Castro menumbangkan Batista, sedangkan wakil presiden Richard Nixon memiliki pandangan yang berbeda terhadap situasi di Kuba. Hal ini menyebabkan pergolakan politik antar kedua negara. Pergolakan politik tersebut berujung pada tindakan Presiden Eisenhower mengeluarkan kebijakan pengurangan kuota gula Kuba yang masuk ke pasar AS. Pada Juli 1960, pemerintah Kuba juga mengeluarkan dan menerapkan kebijakan Agraria yang bertujuan untuk menasionalisasi perusahaan asing secara paksa serta tanpa kompensasi. Kebijakan tersebut berdampak kerugian terhadap sektor privat AS karena ekonomi Kuba pada saat itu didominasi oleh AS. Fidel Castro lalu kemudian menerapkan sistem komunis-

¹Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail :ibnuharidzah@gmail.com

sosialis serta memulai hubungan yang erat dengan Uni Soviet. Atas kebijakan dan tindakan tersebut AS merespon dengan melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Kuba pada 3 Januari 1961 (history.com, 2009).

Setelah pemutusan hubungan dengan Kuba, kedua negara terlibat dalam konfrontasi krisis Teluk Babi dan krisis Misil Kuba. Dalam krisis Teluk Babi, AS mengalami kegagalan yang kemudian di bawah pemerintahan Kennedy menerapkan blokade dan embargo ekonomi terhadap Kuba pada 7 Februari 1962. Blokade AS bertujuan untuk menghalangi kapal-kapal asing masuk menuju Kuba sebagai bentuk pembalasan atas kebijakan Kuba, namun blokade ini hanya berlaku hingga akhir tahun 1963. Sedangkan embargo ekonomi Kuba merupakan sanksi ekonomi yang melarang kegiatan export-import antara kedua negara. AS juga melakukan larangan kegiatan komersial antar negara dan larangan berkunjung menuju Kuba (Pambudi, 2007). Embargo AS telah merugikan ekonomi Kuba sekitar \$15 miliar sepanjang tahun 1961-1991. Kemudian Kuba harus mengalami kemunduran ekonomi ketika Uni Soviet sebagai negara pendukungnya runtuh pada tahun 1991. Akibatnya Kuba tidak mampu mengatasi krisis pada tahun 1993 yang berdampak terhadap sektor industri. Akan tetapi, meski Kuba mengalami krisis ekonomi serta tekanan embargo oleh AS, kekuasaan Fidel Castro terus tetap bertahan hingga tahun 2008 dengan kondisi hubungan AS-Kuba tetap berada di titik terburuk.

Perubahan mulai terjadi ketika kedua negara mengalami pergantian kekuasaan pada tahun 2008. Fidel Castro turun dari jabatannya dan digantikan oleh saudaranya yaitu Raul Castro. Pada 20 Januari 2009, AS juga mengalami fase perubahan kepemimpinan dengan terpilihnya Presiden Barack Obama. Pergantian kekuasaan di AS dan Kuba memiliki dampak terhadap hubungan kedua negara semenjak embargo tahun 1962 diterapkan. Dalam era Presiden Obama, AS mengalami peningkatan hubungan dengan Kuba. Salah satu bentuk peningkatan hubungan yakni mengeluarkan kebijakan melonggarkan batasan terhadap warga AS dan Kuba.

Perubahan pendekatan kedua negara mulai menuju ke tahap yang lebih serius pada tahun 2013. AS dan Kuba sepakat untuk mengutus masing-masing delegasinya untuk mengadakan pertemuan membahas isu-isu penting antar kedua negara yang difasilitasi Paus Franciskus di Vatikan pada Oktober 2013 (voanews.com, 2016). Dari pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan pada bulan Desember 2014, yaitu AS-Kuba melakukan proses normalisasi secara penuh hubungan diplomatik dengan bentuk awal kesepakatan dalam normalisasi tersebut adalah melakukan pertukaran tahanan (cfr.org, 2019).

Pada tanggal 20 Juli 2015, kedua negara membuka kedutaan besar masing-masing sebagai bentuk resmi proses normalisasi dalam hal pendekatan hubungan bilateral kedua negara. Dalam mendukung langkah normalisasi tersebut, pemerintah Obama mengeluarkan dekrit yang melonggarkan regulasi berkunjung dan bisnis. Karena langkah tersebut, sektor kunjungan tercatat mengalami peningkatan sebanyak 127% kunjungan warga AS ke Kuba pada tahun 2017. Kemudian dalam sektor bisnis diantaranya perusahaan jaringan telekomunikasi AS mulai bekerjasama dengan Kuba dalam membangun jaringan internet dan komunikasi di Kuba, kerjasama dalam antar bank AS dan Kuba dalam mempermudah transaksi serta pengiriman uang di Kuba dengan batas tertentu dan kerjasama transportasi antar kedua negara (cubajournal.co, 2017). Selain melonggarkan regulasi, Obama dalam sebuah acara resmi mengatakan bahwa isolasi Kuba telah gagal membawa perubahan demokrasi terhadap Kuba sehingga diperlukannya pendekatan baru dalam meningkatkan kehidupan rakyat Kuba

dan meminta Kongres untuk mencabut embargo terhadap Kuba (abcnews.go.com, 2015).

Berdasarkan data statistik *Pew polls*, menunjukkan sekitar 62% warga AS sepakat untuk mengakhiri embargo terhadap Kuba dan 52% sepakat atas tindakan Obama dalam memperbaiki hubungan dengan Kuba (pewresearch.org, 2016). Karena hingga sekarang, embargo yang diberlakukan sejak tahun 1961 tetap tidak dicabut, sedangkan embargo tersebut sebelumnya merupakan bentuk permusuhan antara AS-Kuba yang kini telah menormalisasi hubungan diplomatik. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan fakta dan data bahwa terdapat antusiasme tinggi dari masyarakat AS untuk mengakhiri embargo terhadap Kuba. Meski demikian, hal tersebut belum dapat mempengaruhi pemerintah untuk mencabut embargo.

KerangkaTeori

Konsep Politik Luar Negeri

Secara umum, politik luar negeri merupakan suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya ([Perwita & Yani, 2005](#)). Sedangkan Kebijakan luar negeri juga merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional ([Perwita & Yani, 2005](#)).

Menurut ahli seperti Rosenau mengatakan kebijakan luar negeri adalah upaya negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Dimana kebijakan luar negeri memiliki tujuan yakni tujuan kebijakan luar negeri mengenai tentang citra keadaan kondisi di masa depan suatu negara dimana pemerintah melalui para perumus kebijaksanaan nasional mampu meluaskan pengaruhnya terhadap negara lain dengan mengubah atau mempertahankan tindakan negara lain ([Perwita & Yani, 2005](#)).

Terdapat juga sumber-sumber politik luar negeri yang akan mempengaruhi tujuan kebijakan AS, dimana sebagai negara demokrasi memiliki sumber- sumber politik luar negeri dalam merumuskan kebijakan, menurut James N, Rosenau terdapat 4 sumber-sumber utama yang menjadi input dalam perumusan kebijakan luar negeri yaitu:

- a. Sumber sistemik, merupakan sumber yang berasal dari lingkungan eksternal suatu negara, dimana sumber ini menjelaskan struktur hubungan antar negara besar, pola-pola aliansi, dan faktor situasional eksternal yang dapat berupa isu area.
- b. Sumber masyarakat, merupakan sumber yang berasal dari lingkungan internal, dimana mencakup faktor kebudayaan dan sejarah, pembangunan ekonomi, struktur sosial dan perubahan opini.
- c. Sumber pemerintahan, merupakan sumber internal yang menjelaskan tentang pertanggung jawaban politik dan struktur dalam pemerintahan.

Sumber idiosinkratik, merupakan sumber internal yang melihat nilai- nilai pengalaman, bakat, serta kepribadian elit politik dalam mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri ([Perwita & Yani, 2005](#)).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif. Data yang digunakan menggunakan data sekunder data yang berasal dari berbagai literatur baik berupa buku, surat kabar, jurnal, artikel, website resmi yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu telaah pustaka atau *library research*. Serta teknik analisis data yang digunakan berupa metode analisis data kualitatif yaitu penulis akan menganalisis dan menjelaskan permasalahan berdasarkan data yang diperoleh kemudian mengaitkannya dengan teori yang digunakan lalu kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Awal Mula Konflik AS-Kuba

Setelah keberhasilan revolusi dalam menggulingkan Rezim Batista, Fidel Castro mengambil alih kekuasaan dan pada tanggal 16 Februari 1959, Fidel Castro resmi menjadi Presiden Republik Kuba. Pada saat itu terdapat perbedaan pandangan dalam pemerintahan AS menanggapi naiknya rezim Fidel Castro meski AS menjadi salah satu negara yang mengakui legitimasi kekuasaan Castro di Kuba. Dimana wakil Presiden AS saat itu, Richard Nixon setuju dengan naiknya Fidel Castro sebagai pemimpin Kuba. Namun Presiden Eisenhower memiliki pandangan yang berbeda, dimana ia tidak setuju terhadap situasi penggulingan Batista dan naiknya Fidel Castro di Kuba. Hal ini menyebabkan pergolakan politik antar kedua negara yang berujung pada tindakan Presiden Eisenhower mengeluarkan kebijakan pengurangan kuota gula Kuba yang masuk ke pasar AS.

Menanggapi hal ini, pada Juli 1960 Kuba mengeluarkan dan menerapkan kebijakan Agraria, yaitu menasionalisasi secara paksa seluruh perusahaan-perusahaan yang berada wilayah nasional Kuba. Setelah Kuba menerapkan kebijakan Agraria, Kuba juga mulai membuka hubungan erat dengan Uni Soviet. Kedekatan tersebut terbukti dengan adanya pertemuan antara Fidel Castro dengan Nikita Khrushchev di New York pada 20 September 1960 dalam acara pertemuan tahunan anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Setelah pertemuan tersebut Uni Soviet-Kuba mengadakan peremuan bilateral yang kemudian menghasilkan pakta kerjasama ekonomi serta militer (wilsoncenter.org, 2019).

Pada 3 Januari 1961, pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Kennedy yang naik di tahun yang sama merespon dan bertindak dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuba (history.com, 2009). Setelah itu, pemerintahan Kennedy terus menekan Fidel Castro. Salah satu yang dilakukan Kennedy adalah dengan mengizinkan *Central Intelligence Agency* (CIA) melancarkan operasi untuk menggulingkan Fidel Castro dengan mendukung kelompok yang merupakan sisa-sisa loyalis pendukung Batista yang diberi nama pasukan *Brigade 2506*. Operasi tersebut yang dikenal dengan Invasi Teluk Babi.

Pada April 1961 tentara nasional Kuba berhasil mengalahkan *Brigade 2506* dan menandakan kegagalan operasi AS dalam menjatuhkan Fidel Castro (cia.gov, 2016). Setelah invasi teluk babi mengalami kegagalan, Presiden Kennedy kemudian menjatuhkan embargo ekonomi terhadap Kuba serta menerapkan blockade total pada 7 Februari 1962.

Embargo Ekonomi AS dan Dampaknya Terhadap Kuba

Amerika Serikat telah menjatuhkan serangkaian embargo ekonomi terhadap Kuba yang dimulai pada tgl 7 Februari 1962. Sanksi pertama tersebut dijatuhkan oleh Presiden langsung dengan menggunakan keputusan Presiden nomor 3447 dengan dasar UU *Foreign Assistance Act* tahun 1961. Melalui UU tersebut Presiden AS memiliki wewenang untuk menjatuhkan embargo ekonomi terhadap Kuba yaitu dengan melarang terhadap semua kegiatan ekspor-impor dan perdagangan antara kedua negara. AS juga melakukan larangan kegiatan komersial antar negara dan larangan berkunjung menuju Kuba (Pambudi, 2007).

Pada tahun 1963, AS mengeluarkan *Cuban Assets Controls Regulations (CACR)* melalui UU *Trading With the Enemy Act of 1917 (TWEA)* pasal 5b yaitu memberikan wewenang Presiden untuk menerapkan embargo komprehensif terhadap negara-negara asing selama "masa perang atau selama periode darurat nasional lainnya yang dinyatakan oleh Presiden" (amnestyusa.org, 2009). CACR memberikan sanksi dengan membekukan semua aset Kuba yang berada di AS dan mengamanatkan Departemen Keuangan AS untuk mengatur semua transaksi komersial dengan Kuba, termasuk perjalanan resmi ke Kuba oleh warga negara AS serta melarang ekspor langsung atau tidak langsung produk, layanan dan teknologi AS ke Kuba.

Namun, embargo ekonomi dijatuhkan terhadap Kuba belum memberikan dampak secara efektif karena telah membuka aliansi terhadap blok timur dengan bergantung dengan Uni Soviet. Baru ketika mendekati puncak akhir Perang Dingin, pada tahun 1989 Uni Soviet mengalami kemunduran yang kemudian berdampak terhadap defisitnya ekspor Kuba. Hingga akhirnya Kuba kehilangan pendukung utamanya yaitu Uni Soviet yang runtuh pada tahun 1991 (amnestyusa.org, 2009).

Pada tahun 1992, Presiden George H. Bush menandatangani *Cuban Democratic Act (CDA)* sebagai UU Amerika Serikat terhadap Kuba yang bertujuan mengusahakan transisi damai menuju demokrasi dan dimulainya kembali pertumbuhan ekonomi di Kuba melalui penerapan sanksi yang diarahkan pada pemerintah Castro dan dukungan bagi rakyat Kuba (amnestyusa.org, 2009). CDA berusaha membatasi kerja sama internasional terhadap Kuba dengan memberlakukan sanksi terhadap negara mana pun yang memberikan bantuan kepada Kuba dengan sanksi mengakhiri bantuan AS untuk negara-negara tersebut dan dengan mendiskualifikasi mereka dari mendapatkan manfaat dari program pengurangan atau pengampunan utang yang berutang ke AS. Apa yang dilakukan AS setelah mengeluarkan UU CDA adalah sebagai bentuk perubahan pendekatan AS dalam menjatuhkan Rezim Fidel Castro setelah Uni Soviet runtuh.

Pada tahun 1996, AS di bawah era Bill Clinton, merespon terhadap adanya pemasukan dana investor asing di Kuba yang melibatkan perusahaan-perusahaan AS yang telah diambil paksa oleh Kuba pada tahun 1960 dan juga menentang terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Kuba. Karena hal ini bagi AS menghambat berjalannya demokrasi di Kuba. Sehingga pada Februari 1996, Bill Clinton mengajukan *Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act (Libertad)* atau umumnya dikenal dengan *Helms- Burton Act* terhadap Kongres. Libertad adalah UU yang lebih kompleks dimana mengikat peraturan-peraturan sanksi sebelumnya kemudian dikodifikasikan kedalam Peraturan AS yang memuat syarat-syarat untuk melakukan pencabutan embargo dan dasar-dasar hukum dalam melindungi properti warga AS yang telah dinasionalisasi oleh Kuba.

Serangkain peraturan embargo yang telah dijatuhkan pada tahun 1963 hingga 1996 oleh AS memiliki dampak terhadap Kuba yaitu, pertama, krisis ekonomi yang

melanda Kuba telah menciptakan ketidakstabilan keamanan di Kuba pada tahun 1994 dengan terjadinya demonstrasi besar-besaran oleh anti pemerintah yang menyebabkan keributan dan perusakan di Kuba yang bermula karena demonstrasi terhadap perekonomian Kuba yang mengalami krisis yang kemudian ditanggapi secara represif oleh pemerintah Kuba (theatlantic.com, 2014). Kedua, Kuba juga mengalami permasalahan dalam perawatan infrastruktur dan transportasi. Tercatat kendaraan di Kuba rusak sekitar 28% rentang tahun 1989 hingga 1993 yang juga berakibat terhadap transportasi umum karena ketiadaan suku cadang sehingga berdampak terhadap mobilitas masyarakat Kuba. Sedangkan infrastruktur total 15% seluruh tempat tinggal yang berada di Kuba berada dalam kondisi buruk dan 1000 rumah roboh di tahun 1994. Rumah Sakit Kuba juga harus mengalami penurunan 50% terhadap kendaraan rumah sakit akibat tidak adanya suku cadang dan juga Rumah Sakit Kuba mengalami kekurangan teknologi rumah sakit berupa alat *X-Ray* Ketiga, mengalami depresiasi mata uang pada tahun 1993 sehingga Kuba terpaksa menerapkan dua mata uang di dalam negaranya yaitu peso dan dolar AS. Kuba tidak memiliki akses pasar terhadap pasar AS dan terbatasnya pasar dengan negara-negara tetangga atau satu regional akibat adanya embargo ekonomi Kuba melalui peraturan CDA oleh AS yang diterapkan pada tahun 1992 (usitc.gov, 2001).

Perubahan Hubungan di Era Obama

A. Periode Pertama tahun 2009-2012

Pada tahun 2008 Kuba mengalami perubahan kekuasaan karena Fidel Castro mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Kuba yang kemudian dilanjutkan oleh adiknya yaitu Raul Castro. Di tahun yang sama, Amerika Serikat berada di masa pemilihan umum yang dimenangkan oleh Barack Obama. Terpilihnya Obama berarti akan ada perubahan perspektif AS dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Sebelumnya ketika Obama masih dalam kampanye, telah mengatakan akan membuka hubungan dengan Kuba. Hal ini kemudian dibuktikan setelah Obama resmi menjadi Presiden pada bulan Januari 2009.

Pada bulan April, pemerintah AS mengeluarkan sebuah kebijakan yang melonggarkan regulasi-regulasi kunjungan terhadap Kuba lalu regulasi remitansi, serta memberikan izin terhadap perusahaan telekomunikasi AS untuk melakukan kesepakatan terhadap pemerintah Kuba dalam membuka saluran komunikasi berupa jaringan seluler dan satelit internet (nytimes.com, 2009). Obama kemudian meminta niat baik Kuba dalam meningkatkan hubungan kedua negara yaitu dengan membebaskan para tahanan politik serta adanya kebebasan beragama di dalam Kuba.

Namun pada desember 2009, terjadi penangkapan kontraktor *US Agency for International Development* (USAID) bernama Alan Gross oleh pihak keamanan Kuba di bandara. Pemerintah Kuba kemudian menuduh bahwa kontraktor USAID diduga telah melakukan tindakan spionase dan mempromosikan demokrasi di Kuba (forward.com, 2012). Alan Gross kemudian dibawa ke pengadilan Kuba dan pada Maret 2011 dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dengan tuduhan yang berbeda yaitu mengancam dan membahayakan keamanan nasional Kuba.

Adanya penangkapan Alan Gross oleh otoritas Kuba menyebabkan keruhnya hubungan AS-Kuba yang baru saja meningkatkan hubungan baik kedua negara. Namun dengan penangkapan Alan Gross menjadi titik AS-Kuba untuk terus berkomunikasi dalam upaya pembebasan Alan Gross.

B. Periode Kedua Tahun 2013-2016

Setelah kemenangan periode kedua Obama Pada tahun 2013. AS mulai merespon niat Kuba yang bersedia membuka pintu diskusi. Kemudian AS dan Kuba sepakat mengutus masing-masing delegasinya untuk mengadakan pertemuan rahasia yang penting antar kedua negara yang akan segera dimulai pada Juni 2013 (nytimes.com, 2014).

Dalam pertemuan kedua negara tersebut, Paus Franciskus turut mendukung dan mengambil andil dalam negosiasi antar kedua negara yaitu dengan mengirim surat resmi kepada Obama dan Raul Castro serta mengatakan agar kedua pihak bisa menyelesaikan isu-isu tahanan-tahanan politik antar negara dan inisiasi AS-Kuba dalam memperbaiki hubungan antar negara. Paus Franciskus juga memberikan fasilitas bagi delegasi AS dan Kuba di Vatikan pada Oktober 2013 (voanews.com, 2016).

Pertemuan kedua negara pada bulan Desember 2014 akhirnya menghasilkan kesepakatan yaitu AS-Kuba melakukan proses normalisasi secara penuh dalam hubungan diplomatik (cfr.org, 2019). Salah satu bentuk awal kesepakatan dalam normalisasi tersebut adalah melakukan pertukaran tahanan, yaitu 5 tahanan mata-mata Kuba yang dikenal dengan *Cuban five* di AS ditukar dengan 1 orang yaitu Alan Gross yang ditahan di Kuba pada 2009 karena diduga melakukan tindakan spionase di Kuba (forward.com, 2012).

C. Proses Normalisasi AS-Kuba di Periode Kedua Obama

Setelah mengumumkan bahwa AS-Kuba akan melakukan normalisasi penuh hubungan, pemimpin kedua negara yaitu Obama dan Raul Castro kemudian berlanjut dengan melakukan pertemuan untuk pertama kalinya pada 11 April 2015 di KTT Amerika, di Panama. Pertemuan pemimpin AS-Kuba merupakan pertemuan sejarah di kedua negara semenjak pemutusan hubungan diplomatik pada Januari 1960 (nytimes.com, 2015).

Perkembangan langkah menuju proses normalisasi hubungan terus berjalan dan pada 1 Juli 2015 Amerika Serikat dan Kuba mengumumkan akan membuka kedutaan besar di masing-masing negara (usatoday.com, 2015). Kemudian pada 20 Juli 2019, Hubungan AS-Kuba telah memasuki babak baru karena telah berhasil dalam normalisasi hubungan diplomatic dengan AS-Kuba telah secara resmi membuka kedutaan besar di masing-masing negara dan secara formal telah memperbaiki hubungan diplomatik yang telah putus semenjak 3 Januari 1961.

Dalam mendukung proses normalisasi antar kedua negara semakin berjalan baik, Amerika Serikat pasca normalisasi hubungan diplomatik mengeluarkan kebijakan pelonggaran terhadap beberapa regulasi sepanjang tahun 2015- 2016, yaitu :

- a. Regulasi kunjungan : Amerika Serikat memperbarui izin kunjungan masyarakatnya untuk berkunjung ke Kuba.
- b. Regulasi remitansi : Amerika Serikat meningkatkan jumlah remitansi dari 500 dollar menjadi 2000 Dollar per quartal. Remitansi diberlakukan kepada warga negara Kuba.
- c. Regulasi transportasi : AS megizinkan layanan-layanan jasa angkutan umum seperti maskapai penerbangan amerika serta layanan angkut kapal untuk membuka rute menuju Havana di Kuba dengan tujuan berkunjung dan pengiriman barang
- d. Regulasi perbankan : Amerika Serikat mengizinkan bank AS untuk melakukan kerjasama dengan Bank Kuba dalam memfasilitasi otoritas

penggunaan kartu kredit dan debit bagi para warga AS yang berkunjung ke Kuba. Warga AS dibolehkan membuka akun bank di Kuba dengan bank yang telah melakukan kerjasama.

- e. Regulasi Bisnis, Ekspor dan impor : Melalui regulasi yang telah revisi, terdapat kegiatan tertentu yang diperbolehkan termasuk kini bisnis, ekspor dan impor.

Pemerintah AS-Kuba kemudian juga akhirnya memulai membahas pembayaran atau kompensasi klaim asset terhadap apa yang telah Kuba lakukan terhadap kebijakan agraria yang menasionalisasi perusahaan asing secara paksa yang dimiliki mayoritas oleh warga negara AS. Hampir terdapat 6000 klaim yang diajukan terhadap Kuba dalam menuntut ganti rugi, berikut 10 perusahaan dengan kerugian terbesar.

Namun terlepas dari keberhasilan negara dalam mencapai beberapa proses normalisasi antara AS-Kuba serta dampak positif dari keuntungan yang didapat Kuba melalui pelonggaran regulasi embargo ekonomi. Hal ini masih belum berhasil menyelesaikan isu utama pembatas utama antar kedua negara dalam berinteraksi penuh dalam kegiatan ekonomi yaitu embargo.

D. Upaya Obama Dalam Mencabut Embargo Ekonomi

Setelah resmi sepakat dalam menormalisasikan hubungan dengan Kuba pada Desember 2014, Obama di dalam acara resmi *State of the Union* yang diadakan 2 tahun sekali di gedung Kapitol dengan jelas mengatakan di hadapan Kongres bahwa alasan Obama untuk mengakhiri kebijakan AS yang bermusuhan dengan menjatuhkan embargo ekonomi Kuba pada tahun 1962 yang bertujuan menjatuhkan Rezim Castro yang telah merubah pendekatannya dengan dekat terhadap Uni Soviet saat itu. Kemudian pada 1992, tujuan dari kebijakan tersebut berubah lagi menjadi kebijakan yang menjatuhkan Fidel Castro dengan dasar membawa Kuba menjadi negara yang lebih demokratis.

Menurut Obama tujuan kebijakan tersebut telah gagal selama 50 tahun lebih dan belum membawa hasil terhadap apa yang ingin dicapai kebijakan luar negeri AS sehingga dibutuhkan kebijakan baru yang merubah pendekatan antara AS-Kuba dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan mempererat persahabatan antara AS dan rakyat Kuba. Oleh karena itu dalam mendukung kebijakan tersebut, embargo ekonomi untuk segera dicabut.

Pada tahun 2016, Obama melakukan kunjungan pertama kalinya ke Kuba sebagai presiden AS beserta pejabat-pejabat pemerintah AS serta anggota Dewan Kongres. Dapat dilihat dari tindakan-tindakan Obama melalui pidatonya pada awal tahun 2015 dan 2016 yang berada di Kuba, terdapat keinginan yang kuat dan yakin dalam menyatakan bahwa embargo ekonomi yang telah ada semenjak 1952 akan berakhir. Namun hingga pada tahun 2017 dimana Obama telah resmi meninggalkan posisinya sebagai Presiden AS, embargo ekonomi tersebut masih berlaku dan tetap berlangsung hingga sekarang.

Alasan AS Tetap Memberlakukan Embargo Ekonomi Kuba Pasca Normalisasi Hubungan Diplomatik

A. Sumber Eksternal

Libertad (*Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act* atau *Helms- Burton Act*) yang secara sah di tandatangani Presiden pada tahun 1996 menjadi dasar dalam mencabutnya embargo terhadap Kuba. Hal ini dapat dilihat Libertad dimana terdapat

bagian-bagian dalam menentukan pencabutan embargo ekonomi Kuba yaitu pada *TITLE II Assistance to a free and independent Cuba. Section 204. Termination of the economic embargo of Cuba, Section 205. Reuuirements and factors for determining a transition government, Section 206. Reuuirements for determining a democratically elected government* (2001-2009.state.gov, 2001).

Secara garis besar dalam UU tersebut dalam *Section 204*, kriteria dalam mencabut embargo yaitu terpenuhinya peralihan pemerintahan Kuba yaitu Kuba harus menegakkan dan menerapkan HAM yaitu pertama dengan melegalkan seluruh kebebasan berpolitik dan melepaskan tahanan politik. Kedua, menghormati convesi 87 *Internasional Labor Organization* (ILO) untuk kaum buruh. Ketiga, adanya pemilihan umum yang bebas dan adil. Keempat, tidak adanya Fidel Castro dan Raul Castro berkuasa. Kemudian poin di dalam tentang demokrasi yaitu pertama, pemilihan pemerintahan berdasarkan pemilihan umum. Kedua, mendirikan pengadilan yang independen. (2001-2009.state.gov, 2001).

Berdasarkan kriteria yang disebutkan, pada kenyataannya Kuba belum memenuhi kriteria tersebut. Sehingga hal ini bisa menjadi dasar dalam keputusan bagi para pengambil kebijakan untuk tetap mempertahankan status embargo ekonomi terhadap Kuba. Bukti-bukti yang dapat dilihat bahwa Kuba masih belum memenuhi kriteria Libertad, sebagai berikut :

a. HAM di Kuba

Hal ini tidak diterapkan oleh Kuba dimana terdapat pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama rezim Castro terhadap masyarakat Kuba, sehingga menurut *The Cuban Commision for Human Rights and National Reconciliation*, terdapat beberapa bentuk pelanggaran HAM yang Kuba lakukan, yakni (hrw.org, 2018) :

1. Kebebasan Berpendapat : Pemerintah Kuba telah memiliki dan mengendalikan segala bentuk media massa dan percetakan. Media massa independen di Kuba dianggap sebagai tindakan illegal dan segala bentuk publikasi dari media massa independen akan termasuk dalam propaganda musuh. Jurnalis independen di dalam Kuba akan selalu diawasi oleh agen pemerintahan.
2. Tahanan Politik : Terdapat penahanan terhadap 54 anggota kelompok *Cuban Patriotic Union*. Penahanan juga terjadi terhadap masyarakat yang melakukan tindakan mengkritik pemerintahan Kuba dengan tuduhan kejahatan persekusi. Tercatat terdapat penahanan sepihak dan penahanan jangka pendek di rentang tahun 2010 hingga 2016 yaitu rata-rata penangkapan dalam satu bulan sekitar 172 orang menjadi 827 orang per bulan. Dalam penahanan tersebut warga tertangkap mengalami pemukulan, ancaman dan isolasi dari orang lain selama beberapa jam atau sehari-hari.
3. Hak Buruh : Kuba telah melakukan pelanggaran terhadap konvensi *International Labour Organization* yang sudah di ratifikasi oleh Pemerintah Kuba pada tahun 1952. Dimana telah melanggar kebebasan berserikat buruh terhadap hak-hak buruh dalam memiliki organisasi independen kelompok buruh, perlindungan upah, dan larangan kerja paksa yang tercantum dalam konvesi ILO nomor 87. Pemerintah Kuba nyatanya melakukan larangan terhadap kelompok buruh untuk membentuk

organisasi buruh selain organisasi buruh yang bernama *Central de Trabajadores*.

4. Kebebasan Sipil : Dalam acara keagamaan di Kuba tidak terlepas dalam pengawasan pemerintah dimana gereja di Kuba dilarang melakukan kegiatan pendidikan secara umum, dan bentuk-bentuk publikasi yang berasal dari gereja akan diintervensi oleh pemerintah dengan melakukan sensor terhadap bentuk publikasi gereja atau melarang bentuk publikasi tersebut.

b. Demokrasi

Dalam Libertad telah dijelaskan yaitu terdapat persyaratan adanya transisi ke demokrasi di dalam Kuba. Apa yang dimaksudkan dalam demokrasi di dalam Kuba adalah adanya perubahan terhadap sistem yang dianut Kuba, dimana Kuba harus memilih kepala pemerintahan Kuba berdasarkan atas pilihan masyarakat dan bebasnya campur tangan Pemerintah Kuba dalam menintervensi lembaga peradilan. Namun hal ini belum dapat realisasikan dan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pemerintahan Kuba : Kuba masih jadi negara yang menerapkan sistem sosialis komunis. Dalam internal pemerintahan Kuba hanya terdapat satu partai politik yaitu PPC yang menguasai seluruh jabatan dalam pemerintahan Kuba. Partai politik selain itu dianggap merupakan tindakan illegal. Majelis Nasional Kuba yang merupakan badan legislatif tidak terlalu banyak memiliki banyak otoritas terhadap eksekutif sedangkan kekuatan eksekutif lebih mendominasi dalam menjalankan roda pemerintahan dan negara. Pemerintah Kuba lebih banyak bergantung pada militer dan anggota keluarga Castro banyak mendapatkan jabatan-jabatan penting dalam mengendalikan bisnis dan politik (freedom.org, 2016).
2. Pengadilan Kuba : Pengadilan Kuba bukanlah pengadilan independen dimana proses hukum dapat diintervensi oleh pemerintah Kuba, dimana Pemerintah Kuba dapat menghukum siapa saja yang dianggap melakukan tindakan ilegal berupa kritikan terhadap pemerintah maka akan segera ditangkap dan dipenjarakan tanpa adanya proses pengadilan atau pembelaan melalui pengadilan (miamiherald.com, 2018).

C. Klaim Aset Privat AS di Kuba

AS mengutamakan prioritasnya dalam mengedepankan klaim-klaim aset yang telah diambil paksa oleh Kuba pada 1961. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi atas nasionalisasi secara paksa oleh Kuba melalui kebijakan agraria. Tuntutan yang dilayangkan oleh AS berupa kerugian sebanyak 5913 klaim aset yang totalnya \$1.9 milyar. Namun justru sebaliknya, pemerintah Kuba malah melayangkan klaim balik terhadap AS yaitu klaim kerugian yang dialami Kuba atas embargo ekonomi sebesar \$121 Miliar (Feinberg, 2015).

Tuntutan AS kemudian juga tercantum peraturan LIBERTAD bagian *tittle III* tentang *Protection of property rights of United States Nationals*, yaitu pemerintah Kuba harus membayarkan segala bentuk kompensasi terhadap aset-aset warga AS yang disita, pemenuhan dalam pembayaran tersebut juga sebagai salah satu persyaratan yang harus terwujud guna mencabut embargo ekonomi terhadap Kuba. Pada bagian *tittle III* juga

mengatakan apabila Kuba telah memenuhi persyaratan dalam pencabutan embargo ekonomi namun belum membayar aset-aset yang disita Kuba, maka pencabutan embargo tetap tidak akan mempengaruhi tuntutan dalam mencapai pembayaran hak aset kepemilikan warga AS (2001-2009.state.gov, 2001).

B. Sumber Internal

a. Kemenangan Partai Republik Tahun 2015

Pada pemilihan Dewan Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir tahun 2014. Partai Republik berhasil memenangkan mayoritas kursi Kongres ke 114 untuk masa 2015 hingga 2017. Dalam kursi Senat Partai Republik menguasai 54 kursi dan kursi DPR menguasai 247 kursi. Sedangkan Partai Demokrat menjadi minoritas di kongres dengan mendapatkan 44 kursi Senat dan 188 kursi DPR (ballotpedia.com, 2014). Maka dengan kemenangan Partai Republik yang berhasil menguasai mayoritas kursi di Legislatif berarti akan adanya mayoritas para pembuat kebijakan untuk tetap mempertahankan embargo ekonomi terhadap Kuba dan menahan keinginan dan progress kebijakan Obama dengan mencabut embargo Kuba.

Hal inilah yang menjadi hambatan pemerintahan Obama dalam berupaya mencabut embargo ekonomi Kuba. Alasannya adalah Partai Republik telah menempatkan posisi untuk menolak apa yang dilakukan kebijakan Obama terhadap pencabutan Embargo ekonomi Kuba. Hal ini dibuktikan dengan beberapa aktor politik ternama Partai Republik yang secara langsung menolak apa yang lakukan Obama terhadap upaya pencabutan Embargo Kuba.

Secara aturan dalam mencabut embargo ekonomi dibutuhkan persetujuan anggota Kongres dengan dasar Libertad pada *Section 204*, yaitu adanya persetujuan oleh Kongres yang dimana sebelum masuk ke tahap resolusi gabungan dibutuhkan rujukan terhadap Komite Hubungan internasional DPR dan Komite Hubungan Luar Negeri Dewan Senat. Komite Hubungan Luar Negeri adalah komite yang menjadi instrumental dalam pengembangan dan pengaruh dalam kebijakan luar negeri AS dan dalam Komite Hubungan Luar negeri masa jabatan 2015-2017 terdapat 1 anggota dimana 10 diantaranya merupakan berasal dari Partai Republik. (govtrack.us, 2005).

b. Penolakan Elit Politik di Dewan Senat

Dalam Kongres terdapat tokoh-tokoh politik yang secara langsung memutuskan untuk tidak akan menyetujui apa yang Pemerintah AS lakukan dalam upaya mencabut embargo ekonomi Kuba. Tokoh-tokoh tersebut adalah merupakan anggota-anggota Dewan Senat yang menduduki kursi Komite Hubungan Luar Negeri AS, sehingga para Senator ini akan menjadi salah satu kunci hambatan terhadap pemerintah AS dalam legislative untuk mencegah dicabutnya embargo ekonomi. Menurut Senator Amy Klobuchar di dalam Dewan Senat cukup terdapat tiga Senator dapat menjadi diterminasi dalam terjadinya penundaan terhadap rancangan peraturan (minnpost.com, 2016). Terdapat tiga tokoh yang memiliki jabatan-jabatan penting yang menolak pencabutan Embargo Ekonomi Kuba, berikut tokoh-tokoh tersebut :

1. Robert Menendez : Senator Menendez beranggapan bahwa mencabut embargo ekonomi Kuba merupakan bukan hal yang bagus dalam kepentingan national AS. Tindakan dalam menormalisasikan hubungan dengan Kuba merupakan sebuah tindakan yang secara tak langsung memberikan legitimasi dukungan terhadap pemerintahan rezim Castro yang represif terhadap rakyat Kuba yang terus mengalami penekanan

dalam kebebasan berpolitik. Senator Menendez juga mengkritisi kesepakatan yang dilakukan AS- Kuba karena menurutnya kesepakatan yang dilakukan tidak akan menghasilkan apapun dimana secara bukti banyak keluarga-keluarga di Kuba yang menjadi korban terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan rezim Castro seperti para warga AS yang harus mengalami kerugian akibat tindakan nasionalisasi aset oleh Kuba secara sepihak tanpa adanya kompensasi, lalu tindakan Rezim Kuba yang terus menangkap para aktivis-aktivis yang ingin menyuarakan suaranya terhadap pemerintahan Kuba. Senator Menendez juga pesimis akan kesepakatan tersebut karena tidak akan adanya substansi yang diharapkan berubah terutama dalam hal peningkatan HAM, kebebasan berpolitik, dan sebagainya

2. Marco Rubio : Dalam menanggapi terhadap kebijakan Obama dalam merubah pendekatan AS-Kuba dengan berupaya mencabut embargo ekonomi terhadap Kuba, Senator Rubio menjadi senator yang paling keras dengan tidak setuju dan menolak terhadap apa yang dilakukan pemerintah AS dengan Kuba. Menurut Senator Rubio yang telah dilakukan Presiden AS terhadap kesepakatan pertukaran tahanan merupakan sesuatu yang merugikan AS dimana menukar 1 tahanan dengan gantinya menukar 5 orang sudah merupakan pertukaran yang buruk yang secara tidak langsung telah memberikan apa yang diinginkan Kuba. Lalu secara politik tidak ada jaminan dengan keberhasilan pertukaran tersebut juga akan membawa perubahan yang diinginkan oleh AS terhadap Kuba
3. Bob Corker : Menurut Corker masih ada hal-hal yang harus dipelajari dalam membahas apakah embargo ekonomi harus dicabut atau tidak, dan juga Senator Corker mengatakan harus melihat apa yang telah dilakukan Pemerintah AS memiliki timbal balik atau perubahan yang diharapkan oleh AS terutama dalam isu HAM.

Kesimpulan

Konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Kuba yang telah terjadi semenjak dijatuhkannya embargo AS terhadap Kuba terus bertahan hingga sekarang. Hubungan kedua negara mulai mengalami peningkatan ketika terjadi perubahan kepemimpinan setelah Raul Castro memimpin Kuba dan Barak Obama memimpin Amerika Serikat. Hubungan tersebut kemudian menghasilkan normalisasi pada tahun 2014. Namun keberhasilan normalisasi tersebut tidak diikuti dengan dicabutnya embargo ekonomi oleh Kuba dengan alasan bahwa Kuba masih belum layak memenuhi kriteria UU *LIBERTAD* yang telah disahkan AS pada tahun 1996 sebagai dasar UU untuk mencabut embargo, dimana masih terjadinya pelanggaran HAM, demokrasi yang masih belum berjalan dan belum adanya pembayaran kompensasi oleh Kuba. Kemudian di dalam pemerintahan AS, Partai Republik mengambil posisi untuk mempertahankan embargo ekonomi terhadap Kuba. Kemudian di dalam Dewan Senat terdapat tokoh-tokoh politik yaitu Senator Robert Menendez, Senator Marco Rubio, dan Senator Bob Corker yang memiliki posisi kuat dalam mempertahankan embargo ekonomi terhadap Kuba, karena dalam mencapai resolusi gabungan Kongres dibutuhkan rekomendasi oleh Komisi Hubungan Luar Negeri di dalam Dewan Senat.

Daftar Pustaka

- 2001-2009.gov, 2001, *tersedia di* ; <http://2001-2009.state.gov>, *di akses* 28 Mei 2019
- Abcnews.go.com, 2015, President asks congress to lift the embargo against Cuba, *tersedia di* ; <http://abcnews.go.com/Politics/president-asks-congress-to-lift-the-embargo-against-cuba-sources/story?id=28358404>, *di akses* 17 Oktober 2018
- Amnestyusa.org, 2009, The US embargo against Cuba Its impact on economic and social rights, *tersedia di* : <https://www.amnestyusa.org/reports/cuba-the-us-embargo-against-cuba-its-impact-on-economic-and-social-rights/>, *di akses* 20 Juli 2019
- Ballotpedia.com, 2014, *tersedia di* [http://ballotpedia.com/United States Congress elections, 2014/](http://ballotpedia.com/United_States_Congress_elections,_2014/), *di akses* di 1 Juni 2019
- Bbc.com, 2018, Cuban Profile-Timeline, *tersedia di* : <http://bbc.com/news/world-latin-america-19576144>, *di akses* 10 Maret 2018
- Cfr.org, 2019, U.S.-Cuba Relations, *tersedia di* ; <http://cfr.org/backgrounder/us-cuba-relations>, *di akses* 21 Februari 2018
- Cia.gov, 2016, The Bay of Pigs Invasion, *tersedia di* <http://cia.gov/news-information/featured-story-archive/the-bay-pigs-invasion.html>, *di akses* 4 Maret 2019
- Cubajournal.co, 2017, Cuba's Economic in 2017, *tersedia di* ; <http://cubajournal.co/cubas-economy-in-2017>, *di akses* 20 Maret 2018
- Feinberg, 2015, *Reconciling U.S. Property Claims in Cuba*, *tersedia di* : <http://brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Reconciling-US-Property-Claims-in-Cuba-Feinberg.pdf>, *di akses* 1 Mei 2019
- Forward.com, 2012, What Did Alan Gross Do in Cuba, *tersedia di* ; <http://forward.com/news/151432/what-did-alan-do-in-cuba>, *di akses* 20 Februari 2018
- Freedom.org, 2016, Cuba, *tersedia di* : <http://freedom.org/report/freedom-world/2016/cuba/>, *di akses* pada tgl 1 Mei 2019
- Govtrack.us, 2005, Senate Committee on Foreign Relations, *tersedia di* ; <http://govtrack.us/congress/committees/SSFR/>, *di akses* 1 Juni 2019
- History.com, 2009, United States severs diplomatic relations with Cuba, *tersedia di* ; <http://history.com/this-day-in-history/united-states-severs-diplomatic-relations-with-cuba>, *di akses* 24 Juni 2018
- Hrw.org, 2018, World Report of Cuba, *tersedia di* <http://hrw.org/2018/country-chapters/cuba/>, *di akses* 28 April 2019
- Miamiherald.com, 2018, Cuba's judicial system Worlds apart from ours, *tersedia di* <http://miamiherald.com/news/article220474265.html>, *di akses* 27 November 2019
- MinnPost.com, 2016, Have Political winds finally shifted on lifting the Cuban Embargo, *tersedia di* : <http://minnpost.com/politics-policy/2016/06/have-political-winds-finally-shifted-on-lifting-the-Cuban-Embargo>, *di akses* 6 Desember 2019
- Nytimes.com, 2009, Obama Opens Door to cuba, *tersedia di* <http://nytimes.com/2009/04/14/world/americas/14cuba.html>, *di akses* 7 Maret 2019

-
- Nytimes.com, 2014, A decades-long Thaw in U.S.-Cuba Relations, *tersedia di* ; <http://nytimes.com/2014/12/18/world/americas/us-cuba-relations.html>, *di akses* 8 Maret 2019
- Nytimes.com, 2015, Obama meets Raul Castro, making history, *tersedia di* : <http://nytimes.com/2015/04/12/world/americas/obama-cuba-summit-of-the-americas.html>, *di akses* 9 Maret 2019
- Pambudi, 1988, *Fidel Castro 60 Tahun Menentang Amerika Serikat*, Yogyakarta; Narasi
- Perwita & Yani, 2005, *Pengantar ilmu Hubungan Internasional*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Pewresearch.org, 2016, America still favor ties with Cuba after Castro's death, U.S. election, *tersedia di* ; <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/12/13/americans-still-favor-ties-with-cuba-after-castros-death-u-s-election/>, *diakses pada tgl* 11 Oktober 2018
- Theatlantic.com, 2014, Cuban Raft Exodus, *tersedia di* : <https://www.theatlantic.com/photo/2014/11/20-years-after-the-1994-cuban-raft-exodus/100852/>, *di akses* 20 Juni 2019
- Usatoday.com, 2015, Obama Cuba announce embassy openings, *tersedia di* : <http://usatoday.com/story/news/nation/2015/07/01/obama-cuba-raul-castro-embassy/29555255/>, *di akses* 9 Maret 2019
- Usitc.gov , 2001, The economic Impact of U.S. Sanctions With Respect to Cuba, *tersedia di* <http://usitc.gov>, *di akses* 12 Juli 2019
- Voanews.com, 2016, Obama Moved Aggresively to Restore Relations with Cuba, *tersedia di*; <http://voanews.com/a/obama-restored-relations-with-cuba/3612438.html>, *di akses* 21 Februari 2018
- Wilsoncenter.org, 2019, Evidence on Soviet-Cuban Relations, *tersedia di* ; <http://wilsoncenter.org/publication/new-russian-evidence-soviet-cuban-relations-1960-61-when-nikita-met-fidel-the-bay-pigs/>, *di akses* 4 Maret 2019